



**LAPORAN PENYELENGGARAAN
FGD PENGELOLAAN PENGADUAN
MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN
TERPADU PERIZINAN DAN
NONPERIZINAN**

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BENGKALIS
TAHUN ANGGARAN 2023**

KATA PENGANTAR

Mencermati keberadaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, merupakan rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Pengaduan Masyarakat dalam pelayanan publik umum terjadi ketika masyarakat selaku pengguna layanan tidak puas atas pelayanan yang diberikan, bahkan menambah kekecewaan ketika pengaduan yang disampaikan tidak dikelola atau ditanggapi secara baik oleh petugas pengaduan. Standar Pelayanan publik yang telah dibuat dan ditetapkan tidak menjamin bahwa penyelenggaraan pelayanan publik memiliki kualitas yang baik. maka penting pengelolaan pengaduan dikelola dengan baik dan efektif dalam rangka membuka akses seluas-luasnya kepada masyarakat selaku pengguna layanan untuk berpartisipasi dalam peningkatan kualitas pelayanan publik.

Untuk itu, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkalis menyelenggarakan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) dengan tema Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan.

Dengan kegiatan FGD ini, sebagai salah satu bentuk Forum Konsultasi Publik diharapkan dapat mencapai keselarasan antara harapan masyarakat dan penyelenggara pelayanan sehingga semakin meningkatkan kepercayaan masyarakat serta meningkatkan persepsi masyarakat terhadap kualitas pelayanan masyarakat dalam bentuk indeks kepuasan masyarakat.

Bengkalis, 19 Oktober 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BENGKALIS,



BASUKI RAKHMAD, AP. M. Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP 197506191995031003

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
A. PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang	1
2. Tujuan dan Manfaat	1
3. Ruang Lingkup	2
B. METODOLOGI PELAKSANAAN FGD	2
1. Waktu dan Tempat Pelaksanaan	2
2. Penyelenggaraan dan Peserta FGD	2
3. Metode Pelaksanaan FGD	2
4. Susunan Acara FGD	3
C. HASIL PELAKSANAAN FGD	3
1. Identifikasi Masalah	3
2. Analisis	4
3. Rencana Aksi	4
D. PENUTUP	4
LAMPIRAN I Berita Acara Yang Ditandatangani	
LAMPIRAN II Salinan Daftar Hadir	
LAMPIRAN III Surat Undangan	
LAMPIRAN IV Domentasi Kegiatan	

A. PENDAHULUAN

1). Latar Belakang

Penyelenggaraan pelayanan publik tidak mungkin terbebas dari pengaduan masyarakat, melalui pengaduan masyarakat menjadi alarm awal atas layanan yang diselenggarakan. Pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat berupa laporan atau pengaduan masyarakat kepada penyelenggara pelayanan. Pelayanan dan penanganan pengaduan harus dilakukan secara sinergis antara pemangku kepentingan dengan tetap mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan, dan masyarakat harus mendapatkan penanganan serta tindak lanjut yang dapat diterima semua pihak. Berbagai upaya-upaya untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat antara lain dengan bersinergitas dengan semua dinas teknis, termasuk unsur kewilayahan. Selain itu kami juga menyediakan sarana pengaduan baik secara online maupun offline.

Dalam rangka evaluasi pelayanan publik Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkalis Tahun 2023 serta perbaikan pelayanan publik Tahun 2022, maka dilakukan kegiatan Forum Konsultasi Publik (FKP) dalam bentuk *Focus Group Discussion* (FGD). Kegiatan FGD ini melibatkan perwakilan pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang ada di Kabupaten Bengkalis. Adapun perwakilan pemangku kepentingan yang hadir pada kegiatan ini, antara lain perwakilan perangkat daerah teknis, perwakilan organisasi, perwakilan pelaku usaha, serta perwakilan dari kantor Kecamatan se-Kabupaten Bengkalis. Melalui Kegiatan FGD ini diharapkan dapat menggali potensi dan langkah-langkah strategis yang berpeluang meningkatkan pelayanan di Kabupaten Bengkalis guna mewujudkan pembangunan kabupaten bengkalis bermasa (bermarwah, maju, dan sejahtera).

2). Tujuan dan Manfaat

Tujuan dari Focus Grup Discussion (FGD) Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan ini adalah :

- mewujudkan pengelolaan pengaduan yang baik dan efektif;
- meningkatkan kompetensi petugas; dan
- meningkatkan kualitas pelayanan publik yang berkelanjutan.

Manfaat yang dapat diharapkan pada kegiatan FGD ini adalah penyelenggara pelayanan dapat memahami dan menerapkan secara sungguh-sungguh semua ketentuan yang berlaku dalam pengelolaan pengaduan pelayanan publik sebagai cerminan bahwa pemerintah benar-benar hadir untuk melayani masyarakatnya, maka kegiatan fgd ini dipandang perlu untuk dilaksanakansebagai bagian dari komitmen DPMPSTSP Kabupaten Bengkalis dalam meningkatkan pelayanan publik.

3). Ruang Lingkup

Kegiatan FGD ini menyoroiti permasalahan terkait Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan.

B. METODOLOGI PELAKSANAAN FGD

1) Waktu dan Tempat Pelaksanaan

- Waktu Pelaksanaan Kegiatan FGD ini telah dilaksanakan pada tanggal 19 Oktober 2023 dimulai pukul 08.30 WIB s.d selesai.
- Adapun tempat pelaksanaan FGD ini bertempat di Aula Hotel Surya Bengkalis, Jl. Panglima Minal, Senggoro, Bengkalis.

2) Penyelenggara dan Peserta FGD

- Penyelenggara Kegiatan FGD ini diinisiasi oleh DPMPTSP Kabupaten Bengkalis melalui Substansi Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan.
- Kegiatan FGD ini dibuka secara langsung oleh Kepala DPMPTSP Kabupaten Bengkalis Basuki Rakhmad, AP,M.Si. Yang menjadi narasumber Dasuki, S.Sos, Kepala Keasistenan Pemeriksaan Laporan Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Riau dan Suhermanto, SE, Inspektur Pembantu V Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkalis
- Adapun peserta kegiatan FGD adalah sebanyak 60 (enam puluh) peserta melibatkan perwakilan pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang ada di Kabupaten Bengkalis. Adapun perwakilan pemangku kepentingan yang hadir pada kegiatan ini, antara lain perwakilan perangkat daerah teknis di Kabupaten Bengkalis, perwakilan organisasi, perwakilan pelaku usaha, serta perwakilan dari kantor Kecamatan se-Kabupaten Bengkalis sedangkan undangan yang mengikuti acara pembukaan FGD sebanyak 80 (delapan puluh) orang, sebagaimana daftar undangan terlampir.

3) Metode Pelaksanaan FGD

- Pada kegiatan FGD ini dilakukan dalam bentuk diskusi dua arah guna mengetahui serta mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi oleh pihak yang mengalami kesulitan/hambatan dalam terkait pengelolaan pengaduan masyarakat
- Pada akhir kegiatan dilakukan kesepakatan terkait hal-hal yang perlu dilakukan perbaikan/peningkatan bagi pihak-pihak yang terlibat pada kegiatan FGD tersebut.

4) Susunan Acara FGD

- Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya
- Pembacaan doa
- Laporan Ketua Pelaksana FGD
- Sambutan dan Pengarahan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkalis sekaligus membuka secara resmi acara FGD
- Penyerahan cenderamata kepada narasumber dari Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Riau dan Narasumber dari Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkalis
- Paparan materi terkait Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan
- Diskusi dan tanya jawab
- Penandatanganan Berita Acara FGD
- Penutup

C. HASIL PELAKSANAAN FGD

1) Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah dalam kegiatan FGD ini, dilakukan sekaligus dalam rangka evaluasi pelayanan publik pada DPMPSTP Kabupaten Bengkalis pada Tahun 2023 serta untuk melakukan perbaikan serta peningkatan pelayanan perizinan berusaha dan perizinan non berusaha Tahun 2023, diantaranya mengidentifikasi permasalahan dalam rangka Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan.

Adapun identifikasi masalah yang muncul, sebagai berikut :

- Apakah untuk izin mandiri bagi bidan, masuk ke Ombudsman atau tidak (Karmila - IDI Cabang Bengkalis)
- Apakah boleh masyarakat melapor ke Ombudsman terkait pengaduan yang diketahui masyarakat tentang penyelenggara negara, misalnya ada penyelenggara negara yang menikah lebih dari satu. (Samsuar - Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkalis)
- Apakah unit pengaduan harus ada di setiap UPT atau cukup ada satu saja untuk setiap perangkat daerah (Samsuar - Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkalis)
- Bagaimana menyikapi izin tambak udang dan galian c yang pengurusannya bisa melalui OSS dan pekerjaannya legal namun pekerjaannya dapat merusak lingkungan (Hanafi - Kantor Camat Bantan)
- Banyak pekerja tidak sesuai dengan upah yang diterima, apakah dilaporkan ke Dinas Tenaga Kerja atau bisa langsung ke Ombudsman (Muhadir - Perkebunan Kabupaten Bengkalis)

2) Analisis

- Sebaiknya jika ada permasalahan difasilitasi oleh Puskesmas atau Dinas Kesehatan terlebih dahulu. Jangan langsung ke Ombudsman.
- Sampaikan pengaduan ke Inspektorat sebelum ke Ombudsman, karena memerlukan investigasi lebih dalam.
- Perangkat daerah yang ada dilayanan publik yang tidak ada pelayanan tidak perlu.
- Kadang-kadang penandatanganan izin hanya dituliskan "dto" oleh karenanya bisa jadi pejabat yang bersangkutan tidak merasa menangani izin tersebut. .
- Pemerintah setempat yang mempunyai kewenangan untuk menandatangani SKT-SPGR sebaiknya jangan sekali-kali mengeluarkan izin untuk kawasan yang berada hutan.
- Jika tercatat di Ketenagakerjaan bisa diproses, namun sebaiknya dilaporkan ke Disnaker terlebih dahulu.

3) Rencana Aksi

Berdasarkan identifikasi dan analisis pembahasan diatas maka rencana aksi yang dilakukan dalam mewujudkan pelayanan publik yang responsif terhadap pengaduan antara lain :

- ✓ Komitmen Pimpinan; memberikan dukungan secara politis yang tampak pada komitmen yang tinggi serta memberikan stimulus berupa kebijakan asimetris bagi unit pengelola pengaduan dengan memastikan proses penerimaan dan penyelesaian pengaduan berjalan sesuai standar operasi yang ditetapkan;
- ✓ Pada aspek sumber daya, sistem pengelolaan pengaduan instansi setidaknya memerlukan 2 hal, yaitu : Staf terampil dalam jumlah yang memadai untuk menanggapi dan menangani aduan yang diterima oleh instansi dengan tepat (menerima pelatihan berkelanjutan dalam penanganan pengaduan yang efektif dan sistem manajemen pengelolaan pengaduan instansi) dan fasilitas sarana dan pra sarana yang dapat menunjang kegiatan pengelolaan pengaduan pelayanan publik di setiap instansi. Fasilitas yang paling dibutuhkan adalah sistem IT atau Sistem pengelolaan pengaduan telah terintegrasi dengan aplikasi lain, seperti SP4NLAPOR! yang apabila dalam waktu 60 hari tidak ditangani maka sipelapor dapat melanjutkan laporannya ke Ombudsman.

D. PENUTUP

Demikian laporan hasil kegiatan Forum Konsultasi Publik dalam bentuk *Focus Group Discussion* (FGD) Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

LAMPIRAN



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan : Antara No. Kode Pos : 28712
 Telp. (0766) 23615 Fax. (0766) 23615 E-Mail : Website : www.bengkalis.go.id

**BERITA ACARA HASIL FGD
 PENGELOLAAN PENGADUAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN TERPADU
 PERIZINAN DAN NONPERIZINAN**

Pada hari ini, Kamis, 19 Oktober 2023, telah dilaksanakan **FORUM GROUP DISCUSSION (FGD) PENGELOLAAN PENGADUAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN TERPADU PERIZINAN DAN NONPERIZINAN** oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkulu. Berdasarkan hasil diskusi dan keputusan bersama menyatakan sebagai berikut :

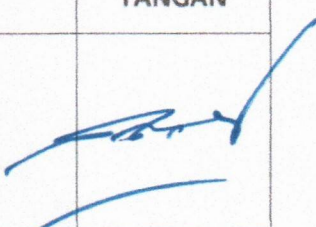
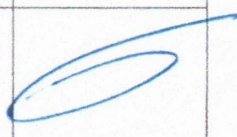
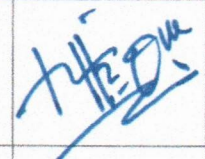
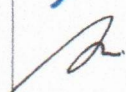
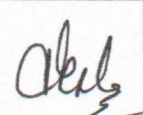
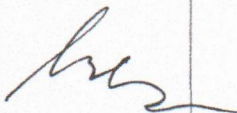
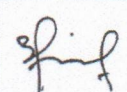
NO	Identitas Masalah	Usulan Rekomendasi Perbaikan	Jangka Waktu Penyelesaian
1.	Praktek mandiri bagi bidan masuk ke Ombudsman atau tidak	Sampaikan pengaduan ke Dinas Kesehatanya	-
2.	Masyarakat apakah boleh melaporkan ke ombudsman terkait pengaduan yang diketahui masyarakat	Sampaikan pengaduan ke Inspektorat sebelum ke ombudsman	-
3.	Di UPT apa Cuma terdapat 1 unit pengaduan	Perangkat Daerah yang ada layanan publik, yang tidak ada tidak perlu	-
4.	Bagaimana menyikapi izin tambak udang dan izin galian c yang pengurusan nya illegal dan merusak lingkungan	Memerlukan penyelidikan. Pemerintah Daerah yang mempunyai kewenangan mengeluarkan SKT SPGR sebaiknya tidak mengeluarkan izin yang berada di Kawasan hutan	-
5.	Banyak pekerja tidak sesuai dengan upah yang diterima. Apakah dilaporkan ke Dinas Tenaga Kerja atau ke Ombudsman?	Jika tercatat di Ketenagakerjaan bisa di proses. Bisa dilaporkan ke Disnaker terlebih dahulu.	-

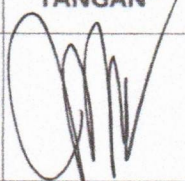
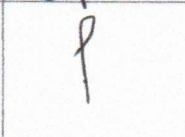
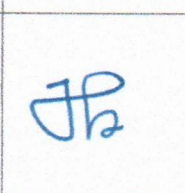
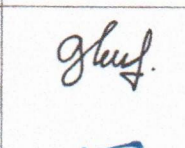
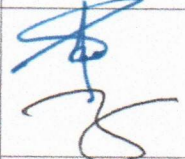
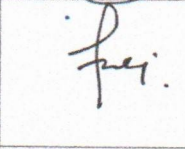
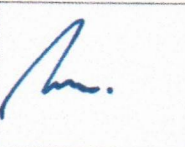

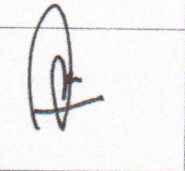
Pimpinan Unit Penyelenggara Pelayanan dapat menerima identitas masalah, usulan rekomendasi, jangka waktu dan berkomitmen menindaklanjuti rekomendasi perbaikan tersebut upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.

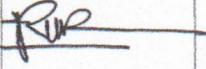
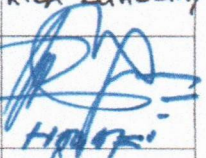
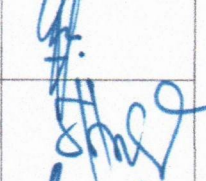

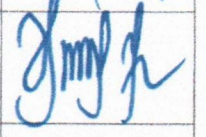

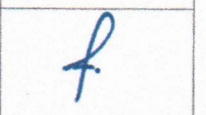
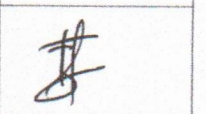
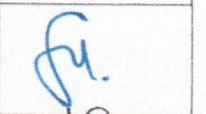
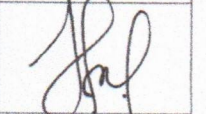
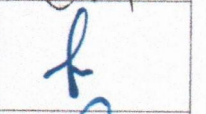
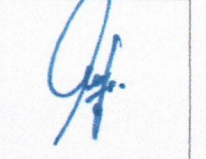
Masyarakat dan *stakeholder* yang hadir akan melakukan pemantauan dan mengawasi progress tindak lanjut perbaikan yang dilakukan oleh Unit Penyelenggara Pelayanan sesuai usulan rekomendasi dan jangka waktu penyelesaian yang telah ditaati bersama.


Demikian berita acara ini dibuat sebagaimana mestinya.

Bengkalis, 19 Oktober 2023

NO	NAMA	NO HP	JENIS KELAMIN (L/P)	PERWAKILAN	TANDA TANGAN
1.	BASUKA (RAKANDA)	082262547231	L	(Koordinator Penyelenggara Layanan) DPMPPTSP Kab. Bengkalis	
2.	DASUKI	081365712759	L	Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Riau	
3.				Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkalis	
3.				Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kabupaten Bengkalis	
4.	Nirwan	08271004969	L	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis	
5.	HERI WAHYUDI		L	Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis	
6.	Evi Erwanty	08136577331	P	Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis	
7.	ZUBAIDAH	085271165550	P	Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis	
8.	Yuliani Eka Saefitri		P	Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bengkalis	

NO	NAMA	NO HP	JENIS KELAMIN (L/P)	PERWAKILAN	TANDA TANGAN*
9.	Mukhtar, SPd	08127691403	L	Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis	
10.	MELOD. MPd MSI	081371540988	P	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bengkalis	
11.	HAMIDAH. S.SH 08127631702		P	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bengkalis	
12.	M. Glenn Iyasha		L	Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis	
13.	SAMSUAR MUHADIR MASRUR, SH.M.A	0823-9236-6621 0812 7615 1150	L L	Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkalis	
14.	M. Adi, S. Akun	0852 9331 5794	P	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis	
15.				Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis	
16.	Dr. NABIE REANTY		P	Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Cabang Bengkalis	
17.	Karmila, Amd. Keb	0813 65448394	P	Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Cabang Bengkalis	
18.				DPD Persatuan Perawat Nasional Indonesia Bengkalis	
19.	Opt. M. Munandar. Sfarm	0852 656 33318	L	Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) Bengkalis	

NO	NAMA	NO HP	JENIS KELAMIN (L/P)	PERWAKILAN	TANDA TANGAN*
20.				Kamar dagang dan Industri Bengkalis	
21.	RIZA ZUHELMI		L	BPC Himpunan Pengusaha Mida Indonesia Bengkalis	 RIZA ZUHELMI
22.	HATWAFI	0832719199	L	Camat Bengkalis	 HATWAFI
23.	Giwang Sora Bhina S.I.P., M.I.P	0812 75590505	P	Camat Bantan Bengkalis	
24.	Sri Rakasju Fali	0812 77898629	P	Camat Siak Kecil Kosi Pely Umum	
25.	DARMAWATI - SE	08126883785		Camat Bukit Batu	
26.	Rosni. SE	0850 1371 9985	P	Camat Bandar Laksamana	
27.	fo gatory			Camat Mandau	
28.				Camat Pinggir	
29.	Fitri Zaharani	0852-7095-1865	P	Camat Bathin Solapan	
30.	Fitri ni	813 65 33300	P	Camat Rupert	
31.	HERTAWATI	082305550160		Camat Rupert Utara	
32.	Romadha			Camat Talang Mandau	
33.	LILI SUKZANI	0813 7113 4091	P	UPT. PELAYANAN PERHINAN SATU PINTU KEC. MANDAU	

NO	NAMA	NO HP	JENIS KELAMIN (L/P)	PERWAKILAN	TANDA TANGAN*
34.	M. Munandar		L	PC. IAI Bengkalis	

*) Penandatanganan adalah masing-masing perwakilan dari Peserta FGD dan wajib mencantumkan nomor kontak/HP

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BENGKALIS,



BASUKI RAKHMAD, AP, M. Si
Pembina Utama Muda
NIP 197506191995031003



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan : Antara No. Kode Pos : 28712




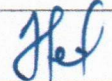





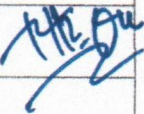


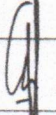

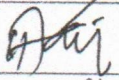
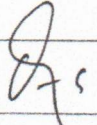

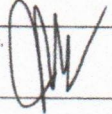
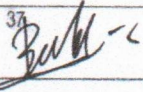

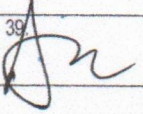

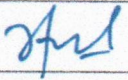
Telp. (0766) 23615 Fax. (0766) 23615 E-Mail : Website : www.bengkalis.go.id

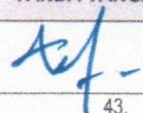





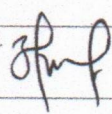

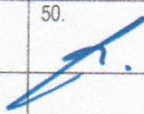

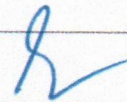
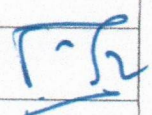
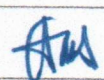
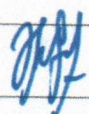


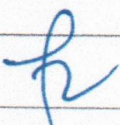
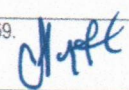
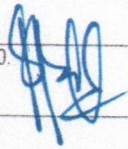
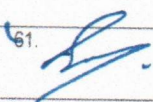
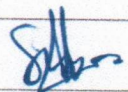

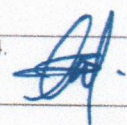
DAFTAR HADIR : FGD PENGELOLAAN PENGADUAN MASYARAKAT TERHADAP
PELAYANAN TERPADU PERIZINAN DAN NONPERIZINAN


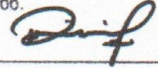
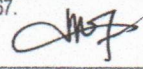











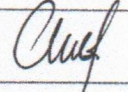

HARI/ TANGGAL : KAMIS, 19 OKTOBER 2023

PUKUL : 08.30 WIB

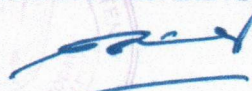
NO.	NAMA	INSTANSI / UNIT KERJA	TANDA TANGAN
1.	BASUKI RAKHMAD	DPMPPTSP	1.
2.	DASUKI	Omibusmanan D	2.
3.	GAUS CARICSAH	DPMPPTSP	3.
4.	STI Rachmawaty	Disdik	4.
5.	ARTIKA SARI	DISDIK	5.
6.	AFRIJAL	DISKOP, UKM	6.
7.	SOSI Lestari	DPMPPTSP.	7.
8.	M. Aei Ibrahim	DPMPPTSP	8.
9.	Nasti hartanti	DPMPPTSP	9.
10.	LILI SURYANI	UPT. PSP KEC. MANDAU	10.
11.	SRI Rahayu Sali	Kantor Camat Bate Kecil	11.
12.	Silvia Cahyaningrum	DPMPPTSP	12.
13.	RANI MULYANI	KEC. BUKIT BATE	13.
14.	SAMSUAR	DISBUN	14.
15.	dr NANNIS ROTANTY	ISI	15.
16.	Karmila, And-keb	IBI	16.
17.	M. JAMIL	DPMPPTSP.	17.
18.	HANAFI	ICMR - CEMET. BATE	18.

NO.	NAMA	INSTANSI / UNITKERJA	TANDA TANGAN
19.	HAMIDAH.S	DISKOP UKM	19. 
20.	MUHADIK, M	DISDUN	20. 
21.	Eri Ewanti	Dinkes	21. 
22.	HERNAWATI	KANTOR CAMAT RUPAT	22. 
23.	Fitriani	Kantor Camat Rumpel	23. 
24.	Fitri Jaharaini	Kantor Camat Bekol	24. 
25.	Romadhon	Kantor Camat Banta	25. 
26.	Fe gatra	Kantor Camat Mude	26. 
27.	Rosmidawati	DPMP TSP	27. 
28.	Nurwan	DLH Bengkulu	28. 
29.	SARIANM	Staf	29. 
30.	Rosmi	Staf	30. 
31.	Giwang Gora Blina	Kantor Camat Bengkulu	31. 
32.	Heri Wahyudi	DINAS PERIKANAN	32. 
33.	Aari Rata Muda	DLH	33. 
34.	Diana Sakura	Disakertran	34. 
35.	Mukhtar	Disdik	35. 
36.	M. MUMANDAR	PC IAI Bengkulu	36. 
37.	Boony R.A. SH	DPMP TSP	37. 
38.	RIZA ZUHELMI	HIPMI	38. 
39.	AZRUL NOR	HIPMI	39. 
40.	AKMAL MAHAUDI	DPMP TSP	40. 
41.	JAMALIA	DINKES	41. 

NO.	NAMA	INSTANSI / UNITKERJA	TANDA TANGAN
42.	M. Agh. S. alim	VPT. Mace	42. 
43.	ZUBAIDAH. ANDAH	DINSOS	43. 
44.	AIOHA APRILLA	DINSOS	44. 
45.	M. Glenn Nyasha	DISHUB	45. 
46.	Syamwani	DISNAGPERIN	46. 
47.	Rima Sanjaya	DPMPISP	47. 
48.	Juliani Eka Satri	DISNAGPERIN	48. 
49.	IMELDA. MP. MS.	DISPERSIP	49. 
50.	ARIF FD	DPMPISP	50. 
51.	EMMA YANI	-	51. 
52.	RAHMA PUTRA	DPMPISP	52. 
53.	HJ. ESTYNUWATI	SLI	53. 
54.	SAMBUL	Camat Bathin Selam.	54. 
55.	DARMAWATI, SE	Camat. Bumi Batu	55. 
56.	RAMZAN		56. 
57.	Suhartini		57. 
58.	Ayustina		58. 
59.	NOPIANI	PKPL	59. 
60.	BELLA RAMANDHA		60. 
61.	SRI UTAMI ANBRAYNI	DPMPISP	61. 
62.	Shinta Julianti	DPMPISP	62. 
63.	SIDIA. M.	DPMPISP	63. 
64.	Aldina. natasya	DPMPISP	64. 

NO.	NAMA	INSTANSI / UNITKERJA	TANDA TANGAN
65.	Perni Ayusw	DPMPPTSP GRS	65. 
66.	Febrian Pratama	DPMPPTSP	66. 
67.	Ruzka	DPMPPTSP	67. 
68.	AHMAD FAISAL,AMD	...	68. 
69.	MERISA		69. 
70.	Dandi		70. 
71.	INDRA		71. 
72.	Sopya		72. 
73.	RUSLI	PMD	73. 
74.	Mardiana		74. 
75.	Irwan.M		75. 
76.	Rosnah		76. 
77.	HARRY P		77. 
78.	RUSMANIAH	DPMPPTSP	78. 
79.	AISYAH		79. 
80.	Andi		80. 
81.			81.
82.			82.

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BENGKALIS,


BASUKI RAKHMAD, AP. M.Si
Pembina Utama Muda
NIP 197506191995031003



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan : Antara No. Kode Pos : 28712

Telp. (0766) 23615 Fax. (0766) 23615 E-Mail : Website : www.bengkalis.go.id

Bengkalis, 13 Oktober 2023

Nomor : 500.16.7/ 362/DPMPTSP
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Undangan FGD Pengelolaan
Pengaduan Masyarakat

Yth. (Daftar terlampir)
di
Tempat

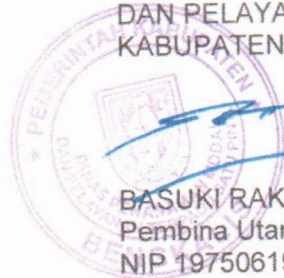
Dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat serta membangun sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang adil, transparan, dan akuntabel, Pemerintah Kabupaten Bengkulu melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkulu akan melaksanakan kegiatan FGD Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan.

Berkenaan dengan hal tersebut dimohon kepada Bapak agar dapat kiranya mengirimkan 2 (dua) orang ASN sebagai peserta pada acara FGD dimaksud dengan mengkonfirmasi kepada Sdri. BELLA RAMANDHA, S. Kom (HP. 081212508482) dan Sdri. NOPIANTI S.AP (HP. 085355093634). Kegiatan FGD akan dilaksanakan pada :

Hari/tanggal : Kamis / 19 Oktober 2023
Pukul : 08.30 wib s.d selesai
Acara : FGD Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap
Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan
Tempat : Ruang Rapat Hotel Surya Bengkulu Jl. Panglima Minal,
Senggoro, Bengkulu

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BENGKALIS,



BASUKI RAKHMAD, AP, M. Si
Pembina Utama Muda
NIP 197506191995031003

Lampiran : Undangan FGD Pengelolaan Pengaduan Masyarakat
Nomor : 500.16.7/ /DPMPTSP
Tanggal : Oktober 2023

Daftar nama Perangkat Daerah/Instansi :

1. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bengkalis
2. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis
3. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis
4. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis
5. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis
6. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bengkalis
7. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis
8. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
9. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bengkalis
10. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis
11. Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkalis
12. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis
13. Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan : Antara No. Kode Pos : 28712

Telp. (0766) 23615 Fax. (0766) 23615 E-Mail : Website : www.bengkalis.go.id

Bengkalis, 13 Oktober 2023

Nomor : 500.16.7/363/DPMPTSP
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Undangan FGD Pengelolaan
Pengaduan Masyarakat

Yth. Camat se-Kabupaten Bengkalis
di
Tempat

Dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat serta membangun sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang adil, transparan, dan akuntabel, Pemerintah Kabupaten Bengkalis melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkalis akan melaksanakan kegiatan FGD Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan.


Berkenaan dengan hal tersebut dimohon kepada Bapak agar dapat kiranya mengirimkan 1 (satu) orang ASN sebagai peserta pada acara FGD dimaksud dengan mengkonfirmasi kepada Sdri. BELLA RAMANDHA, S. Kom (HP. 081212508482) dan Sdri. NOPIANTI S.AP (HP. 085355093634). Kegiatan FGD akan dilaksanakan pada :

Hari/tanggal : Kamis / 19 Oktober 2023
Pukul : 08.30 wib s.d selesai
Acara : FGD Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap
Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan
Tempat : Ruang Rapat Hotel Surya Bengkalis Jl. Panglima Minal,
Senggoro, Bengkalis

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BENGKALIS,




BASUKI RAKHMAD, AP, M. Si
Pembina Utama Muda
NIP 197506191995031003



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan : Antara No. Kode Pos : 28712

Telp. (0766) 23615 Fax. (0766) 23615 E-Mail :Website : www.bengkalis.go.id

Bengkalis, 13 Oktober 2023

Nomor : 500.16.7/ 364/DPMPPTSP
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Undangan FGD Pengelolaan
Pengaduan Masyarakat

Yth. (Daftar terlampir)

di
Tempat

Dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat serta membangun sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang adil, transparan, dan akuntabel, Pemerintah Kabupaten Bengkulu melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkulu akan melaksanakan kegiatan FGD Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan.

Berkenaan dengan hal tersebut dimohon kepada Bapak agar dapat kiranya mengirimkan 1 (satu) orang sebagai peserta pada acara FGD dimaksud dengan mengkonfirmasi kepada Sdri. BELLA RAMANDHA, S. Kom (HP. 081212508482) dan Sdri. NOPIANTI S.AP (HP. 085355093634). Kegiatan FGD akan dilaksanakan pada :

Hari/tanggal : Kamis / 19 Oktober 2023
Pukul : 08.30 wib s.d selesai
Acara : FGD Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap
Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan
Tempat : Ruang Rapat Hotel Surya Bengkulu Jl. Panglima Minal,
Senggoro, Bengkulu

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BENGKALIS,



BASUKI RAKHMAD, AP, M. Si
Pembina Utama Muda
NIP 197506191995031003

Lampiran : Undangan FGD Pengelolaan Pengaduan Masyarakat
Nomor : 500.16.7/ 364/DPMPTSP
Tanggal : 13 Oktober 2023

Daftar nama Perangkat Daerah/Instansi :

1. Ketua Ikatan Dokter Indonesia Cabang Bengkulu
2. Ketua Ikatan Bidan Indonesia Cabang Bengkulu
3. Ketua DPD Persatuan Perawat Nasional Indonesia Bengkulu
4. Ketua Pengurus Cabang Ikatan Apoteker Indonesia Bengkulu
5. Ketua KADIN Bengkulu
6. Ketua BPC HIPMI Kabupaten Bengkulu



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan : Antara No. Kode Pos : 28712
Telp. (0766) 23615 Fax. (0766) 23615 E-Mail : Website : www.bengkalis.go.id

NOTA - DINAS

Kepada : 1. Sdr. Sekretaris
2. Sdr. Sub Koordinator JF Penanaman Modal Substansi Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal
3. Sdr. Sub Koordinator JF Penanaman Modal Substansi Promosi Penanaman Modal

Dari : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Bengkulu

Tanggal : 15 Oktober 2023

Nomor : 500.16.7/ 365 /DPMPTSP

Sifat : -

Lampiran : -

Hal : FGD Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan

Dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat serta membangun sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang adil, transparan, dan akuntabel, Pemerintah Kabupaten Bengkulu melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkulu akan melaksanakan kegiatan FGD Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan.

Berkenaan dengan hal tersebut dimohon kepada Bapak agar dapat kiranya menghadiri acara Pembukaan FGD dimaksud yang akan dilaksanakan pada :

Hari/tanggal : Kamis / 19 Oktober 2023
Pukul : 08.30 wib s.d selesai
Acara : FGD Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan
Tempat : Ruang Rapat Hotel Surya Bengkulu Jl. Panglima Minal, Senggoro, Bengkulu

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BENGKALIS,



BASUKI RAKHMAD, AP, M. Si
Pembina Utama Muda
NIP 197506191995031003



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan : Antara No. Kode Pos : 28712
Telp. (0766) 23615 Fax. (0766) 23615 E-Mail :Website : www.bengkalis.go.id

NOTA - DINAS

Kepada : (Daftar terlampir)
Dari : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kab. Bengkulu
Tanggal : 15 Oktober 2023
Nomor : 500.16.7/ 366 /DPMPTSP
Sifat : -
Lampiran : -
Hal : FGD Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu
Perizinan dan Nonperizinan

Dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat serta membangun sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang adil, transparan, dan akuntabel, Pemerintah Kabupaten Bengkulu melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkulu akan melaksanakan kegiatan FGD Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan.

Berkenaan dengan hal tersebut dimohon kepada Bapak agar dapat kiranya mengikuti acara FGD dimaksud sebagai peserta kegiatan yang akan dilaksanakan pada :

Hari/tanggal : Kamis / 19 Oktober 2023
Pukul : 08.30 wib s.d selesai
Acara : FGD Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan
Terpadu Perizinan dan Nonperizinan
Tempat : Ruang Rapat Hotel Surya Bengkulu Jl. Panglima Minal,
Senggoro, Bengkulu

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.



KERALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BENGKALIS,

(Signature)
BASUKI RAKHMAD, AP, M. Si
Pembina Utama Muda
NIP 197506191995031003

Lampiran : Undangan FGD Pengelolaan Pengaduan Masyarakat
Nomor : 500.16.7/ /DPMPTSP
Tanggal : Oktober 2023

Daftar nama Perangkat Daerah/Instansi :

1. Sdr. Koordinator JF Pelayanan Terpadu Satu Pintu Substansi Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan A (P3BN-A)
2. Sdr. Koordinator JF Pelayanan Terpadu Satu Pintu Substansi Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan B (P3BN-B)
3. Sdr. Koordinator JF Penanaman Modal Substansi Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal
4. Sdr. Koordinator JF Penanaman Modal Substansi Promosi Penanaman Modal
5. Sdr. Koordinator JF Penanaman Modal Substansi Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Sistem Informasi
6. Sdr. Koordinator JF Pelayanan Terpadu Satu Pintu Substansi Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan
7. Sdr. Sub Koordinator JF Penata Perizinan Ahli Madya Substansi Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan A/II/III
8. Sdr. Sub Koordinator JF Penata Perizinan Ahli Madya Substansi Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan B/II/III
9. Sub Koordinator JF Penanaman Modal Substansi Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Sistem Informasi
10. Kepala UPT Pelayanan Perizinan Satu Pintu Kec. Mandau
11. Kasubbag TU UPT Pelayanan Perizinan Satu Pintu Kec. Mandau
12. Plh. Sub koordinator Pengelolaan Pengaduan dan Pelayanan Informasi
13. Petugas Front Office Pengaduan







